



**PENETAPAN**

Nomor 0701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Itsbat Nikah “ yang diajukan oleh :

**Saparudin bin Nasrudin**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I**”

**Siska Rian Elpiyana binti Sahidun**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor 0701 /Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2010 di di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahidun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M.Saleh S.Pd.I dan Ismail saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan,
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Dede Saprianto, laki-laki umur 5 tahun; ;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal.2 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( Saparudin bin Nasrudin) dengan Pemohon II (Siska Rian Elpiyana binti Sahidun) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 Agustus 2010 di di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 471.1/Pem./86/2017, tanggal 11 Oktober 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.1) ;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 471.1/Pem./87/2017, tanggal 11 Oktober 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaha Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.2 ) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Ismail bin Mansur, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Benyer Daya, bertempat tinggal di Dusun Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya

Hal.4 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14

Agustus 2010 di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan

Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Sahidun, dan saksi nikahnya bernama Ismail dan

saksi sendiri, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN

dan tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan

buku nikah;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan

Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai

hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk

menikah;

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak

ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan

mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal

bersama di rumah Pemohon I, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini

rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah

untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan

pembuatan akta kelahiran anak ;

Saksi 2. Muhamad Saleh, S.Pd.I bin Samudin, umur 30 tahun, agama

Hal.5 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Desa

Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu

hubungan mereka sebagai suami istri;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon 1 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14

Agustus 2010 di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan

Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Sahidun, dan saksi nikahnya bernama Ismail dan

saksi sendiri , dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu

rupiah) dibayar tunai ;

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak dilakukan dihadapan PPN

dan tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan

buku nikah;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan

Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai

hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk

menikah;

- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak

ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan

mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal

Hal.6 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Pemohon I, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;  
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini

rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad ;  
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah

untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan  
pembuatan akta kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon  
membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan  
mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada  
hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak  
terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan  
Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah  
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya  
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2  
( Surat Keterangan Domisili ) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana

Hal.7 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2010 di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahidun , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Saleh S.Pd.I dan Ismail, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.8 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus persyaratan pembuatan akata kelahiran anak para Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

**... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح**

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى  
عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal.9 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( Saparudin bin Nasrudin ) dengan Pemohon II ( Siska Rian Elpiyana binti Sahidun ) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2010 di Benyer Daya, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 10 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. sebagai Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sunaiyah, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 200.000, - |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-    |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-    |
| Jumlah               | Rp. 291.000,-  |

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.12 dari 12. Penetapan No. 701/Pdt.P/2017/PA.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)